BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets)

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.[1] Sedangkan definisi kebijakan yang diajukan oleh Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.[2]

Sebuah kebijakan lahir karena ada suatu masalah yang hendak dipecahkan. Oleh karena itu, kebijakan merupakan alat atau cara untuk memecahkan masalah yang sudah ada sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar pembuatan kebijakan adalah masalah. Jika tidak ada masalah tidak perlu ada suatu kebijakan baru.[3]

Untuk perbaikan atau pemulihan habitat dan stok sumber daya ikan di Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu berupa peraturan yang mana salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 tentang larangan

---

[1] http://kbbi.web.id/bijak (Rabu, 15 Februari 2017, 22.35)
[2] Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 47.
[3] Dr. Khoirul Yahya, "*Kuliah Umum Kebijakan Publik",* ppt. Dosen Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda lain-lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.[4]

Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) menegaskan pentingnya perhatian atas daya dukung dan kelestarian sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan.[5]

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2012, jumlah alat tangkap yang digunakan untuk beroperasi di wilayah perairan Indonesia sekitar 1,177 juta unit. Dari data tersebut sebanyak 1,66% atau sebanyak 19.544 unit merupakan alat tangkap pukat tarik (cantrang). Kebijakan ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat nelayan yang ada di Indonesia dalam pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.

Dalam Islam disebutkan bahwa terdapat tuntutan bagi umat manusia untuk menjaga lingkungan hidup baik di darat dan di laut. Kerusakan alam

---

[4] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 pasal 1 ayat (1)

[5] http://villagerspost.com/today-feature/pelarangan-alat-tangkap-merusak-harus-dibarengi-solusi.html (Selasa, 19 April 2016, 21.38)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan lingkungan hidup yang ada saat ini merupakan akibat dari perbuatan umat manusia. Disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman;

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". (Ar-Rum/30:41).

Ibnu Katsir Rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, "Zaid bin Rafi' berkata, 'Telah nampak kerusakan,' maksudnya hujan tidak turun di daratan yang mengakibatkan paceklik dan di lautan yang menimpa binatang-binatangnya".

Pada kondisi sumber daya ikan yang mengalami tangkap lebih dan kerusakan habitat seperti di Indonesia saat ini, pemberlakuan peraturan ini jelas akan berdampak pada perbaikan atau pemulihan habitat dan stok sumber daya ikan di Indonesia. Hal ini juga nantinya akan meningkatkan hasil tangkap per satuan usaha (CpUE) dari nelayan karena stok mengalami pemulihan.[6]

Alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) merupakan alat tangkap ikan yang tidak selektif.[7] Pukat hela (trawls)

---

[6] Ir. Sukandar, Fuad, Ledhyane Ika H, dkk. *Tinjauan Akademis Terhadap PERMEN-KP No. 2/2015 , (*Malang: Tim BPP FPIK – Universitas Brawijaya, 2015)

[7] Suwarman Partosuwiryo, *Dasar-Dasar Penangkapan Ikan*, (Yogyakarta: Alam Media, 2002), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Selain itu pengoperasiannya juga dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya alat tangkap tersebut digunakan untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan damersal termasuk udang dan *crustocea*. Pukat hela dasar dioperasikan di dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan damersal, udang dan *crustocea* lainnya. Sedangkan pukat hela pertengahan dioperasikan di kolom perairan dan umumnya digunakan untuk menangkap ikan pelagis.

Pukat tarik (seine nets) merupakan alat penangkapan ikan berkantong tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan ikan lalu menariknya ke kapal yang sedang berhenti melalui tali selambar di kedua bagian sayapnya. Selain itu, pengoperasiannya juga dilakukan pada permukaan, kolom maupun dasar perairan dan alat penangkapan ikan ini digunakan untuk menangkap ikan damersal dan ikan pelagis tergantung jenis pukat tarik yang digunakan. Pukat tarik pantai dioperasikan di daerah pantai untuk menangkap ikan pelagis dan demersal yang hidup di daerah pantai. Dogol dan lampara dasar dioperasikan pada dasar perairan, umumnya digunakan untuk menangkap ikan damersal dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

payang dioperasikan di kolom perairan yang umumnya digunakan untuk menangkap ikan pelagis.[8]

Terdapat beberapa kriteria alat tangkap yang diperbolehkan oleh Pemerintah (ramah lingkungan) serta alat tangkap yang dilarang oleh Pemerintah. *Food Agriculture Organization* (FAO, sebuah lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa yang menangani masalah pangan dan pertanian dunia), pada tahun 1995 mengeluarkan suatu tata cara bagi kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab (*Code of Conduct for Resposible Fisheries – CCRF*). Dalam CCRF ini, FAO menetapkan serangkaian kriteria bagi teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan diantaranya; alat tangkap harus memiliki selektivitas yang tinggi, tidak merusak habitat tempat tinggal dan berkembang biak ikan dan organisme lainnya, tidak membahayakan nelayan, menghasilkan ikan yang bermutu baik, hasil tangkapan yang terbuang minimum, alat tangkap yang digunakan harus memberikan dampak minimum terhadap keanekaragaman sumberdaya hayati (biodiversity), tidak menangkap jenis ikan yang dilindungi Undang-Undang atau terancam punah, dan terakhir diterima secara sosial yang artinya dimasyarakat nelayan tidk menimbulkan konflik.[9]

Sedangkan kriteria alat tangkap ikan yang dilarang adalah kebalikannya yaitu; tidak selektif atau memiliki selektivitas yang rendah,

---

[8] Firhat Syauqi Aulia Ula, "Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Kabupaten Lamongan" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016), 4-5.

[9] http://alansmart.blogspot.co.id/2013/06/kriteria-alat-tangkap-ikan-yang-ramah_2.html?m=1 (Senin, 06 Agustus 2017, 20.20)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merusak habitat tempat tinggal dan berkembang biak ikan dan organisme lainnya, membahayakan nelayan, hasil tangkapan ikan yang terbuang maximum (banyak), alat tangkap yang menangkap jenis ikan yang dilindungi Undang-Undang atau yang terancam punah.

Masalah adalah sebagian dari agenda publik dan kebijakan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. Tentu saja, ketika pembuat undang-undang mengadopsi kebijakan dalam masalah yang sangat kompleks, peraturan akan selalu memiliki beberapa perbedaan dalam memberi jawaban atau dalam pemasalahan riil dilapangan. Kebijakan pada dasarnya berupaya mengakomodasi berbagai kepentingan (khususnya yang dominan) sehingga ketika telah terformulasi sebagai sebuah peraturan maka akan mereduksi banyak hal secara detail dari fenomena sehari-hari.

Setelah suatu kebijakan itu dibuat dan di tetapkan atau diundangkan proses selanjutnya yaitu sosialisasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

a. Sosialisasi adalah penyebarluasan informasi (program, peraturan. Kebijakan) dari satu pihak (pemilik program) ke pihak lain (masyarakat umum) dan proses pemberdayaan, dimana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis, menumbuhkan perubahan sikap, dan perilaku masyarakat.[10] Adapun tujuan sosialisasi secara umum adalah mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasi makna dari konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah, masyarakat luas mengetahui dan memahami perkembangan

[10] PNPM Mandiri Perkotaan "*Sosialisasi",* http://www.P2Kp.org/about.asp (Senin, 27 Februari 2017, 19.30)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan program pemerintah sebagai bagian dari pertanggungjawaban terhadap publik, menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang terdapat dalam siklus program dari kebijakan pemerintah.[11]

b. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.[12] Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang telah diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. dan yang terakhir adalah bagaimana mengantarkan kebijakan secara kongkrit kepada masyarakat.[13]

c. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggungjawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan

---

[11] Dr. Khoirul Yahya, "*Kuliah Umum Kebijakan Publik",* ppt. Dosen Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya.
[12] Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 295.
[13] Ibid, 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.[14]

2. Kesejahteraan Masyarakat Nelayan

a. Konsep Kesejahteraan

1) Definisi Kesejahteraan

Menurut Sudarman Danim manusia yang sejahtera adalah manusia yang tata kehidupan dan penghidupan seseorang yaitu seseorang baik sosial material maupun spiritual yang disertai dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin sehingga dapat memenuhi kebutuhan jasmaniyah, rohaniyah dan sosialnya.[15]

Dari pengertian diatas maka dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan seseorang baik sosial material maupun spiritual yang disertai dengan rasa keselamatan, kasusilaan dan ketentraman lahir dan batin sehingga dapat memenuhi kebutuhan

[14] Dr. Khoirul Yahya, "*Kuliah Umum Kebijakan Publik",* ppt. Dosen Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya.
[15] Sudarman Danim, *Transformasi Sumber Daya...,* 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasmaniah, rohaniah, dan sosialnya. Kesejahteraan juga bersifat subjektif . Gambaran masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang secara kuantitatif memiliki pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan diri secara wajar dan secara kualitatif dapat menikmati kehidupan yang nyaman secara fisik dan spiritual.[16]

Kesejahteraan dalam Islam pada intinya mencakup dua hal pokok yaitu kesejahteraan yang bersifat jasmani (lahir) dan rohani (batin). Sejahtera lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap pribadi (individu) yang bekerja untuk kehidupannya sendiri, sehingga akan terbentuk keluarga/masyarakat dan negeri yang sejahtera. Nabi Muhammad SAW bersabda; "Apabila seseorang diantara kamu bekerja walaupun di dalam batu karang yang keras tiada berpintu ataupun berlobang, niscaya Allah akan mengeluarkannya (agar terlihat) keberadaannya oleh manusia" (HR. Abu Daud).[17]

Dalam Al-Qur'an juga disebutkan beberapa ayat yang terkait dengan kesejahteraan keluarga/masyarakat di antaranya dalam QS. Al-Isra ayat 26, Allah SWT berfirman;

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

[16] Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik (Pemerintahan dan Otonomi Daerah), (Jakarta: Grasindo, 2007), 307.

[17] https://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-islam-tafsir-tahlil (Selasa, 08 Agustus 2017, 20.50)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya, “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (QS. Al-Isra/17:26).

Kemudian dalam QS. Al-Maun ayat 1-3, Allah berfirman;

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

Artinya “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (1) Itulah orang yang menghardik anak yatim (2) dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (3)” (QS. Al-Maun/107:1-3).

2) Ciri – Ciri Kesejahteraan

Suatu masyarakat bisa dikatakan sejahtera yaitu jika mampu memenuhi 3 aspek kesejahteraan yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangan.

a) Kebutuhan Dasar Manusia

Manusia memiliki sifat dasar yang tidak akan pernah sepenuhnya merasa puas, karena kepuasan bagi manusia bersifat sementara. Ketika suatu kebutuhan terpuaskan maka akan muncul kebutuhan lain yang lebih tinggi nilainya, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuntut untuk dipuaskan, begitu pula seterusnya.[18] Maslow memiliki konsep fundamental unit dari teorinya, yaitu :

Manusia dimotivasikan oleh sejumlah kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk seluruh spesies, tidak berubah, dan berasal dari sumber genetis atau naluriah.

Kebutuhan-kebutuhan itu juga bersifat psikologis, bukan semata-mata fisiologis. Kebutuhan-kebutuhan itu merupakan inti kodrat manusia, hanya saja mereka itu lemah, mudah diselewengkan dan dikuasai proses belajar, kebiasaan atau tradisi yang keliru.[19]

Kebutuhan-kebutuhan ini senantiasa muncul, meskipun dimungkinkan tidak secara berurutan, Dalam pengertian, bahwa kebutuhan yang paling dasar akan muncul terlebih dahulu dan mendesak untuk dipenuhi, dan jika kebutuhan ini sudah terpenuhi akan muncul kebutuhan berikutnya yang juga menuntut untuk dipenuhi. Namun dimungkinkan ada sebagian kecil orang yang kebutuhan dasarnya berbeda struktur hierarkinya dibanding dengan yang lain. Misalnya orang yang memiliki keyakinan tertentu akan memilih kelaparan dari pada harus menghilangkan keyakinannya.

---

[18] Hasyim Muhammad, *Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 70.

[19] Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga: Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, terj. Drs. A. Supratiknya, (Yogyakarta: kanisius, 1992), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebutuhan dasar manusia yaitu meliputi kebutuhan sandang dilihat dari konsumsi pakaian, kebutuhan pangan dilihat dari taraf dan pola konsumsi yang terdiri dari pengeluaran rumah tangga dan konsumsi energi dan protein/kecukupan gizi, kebutuhan papan dilihat dari perumahan dan lingkungan yaitu dari kualitas rumah tinggal (lantai, atap, dinding), fasilitas rumah tangga (air bersih, sanitasi, PLN), dan status kepemilikan rumah tinggal. Sedangkan kesehatan bisa dilihat dari angka harapan hidup, angka kematian bayi, angka kesakitan, prevelensi balita kurang gizi, prosentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, serta berobat jalan ke RS/Klinik/Puskesmas/Dokter dan lain-lain.[20]

b) Kebutuhan sosial psikologis

(1) *Kebutuhan rasa aman* "*safety needs*". Rasa aman dalam bentuk lingkungan psikologis yaitu terbebas dari gangguan dan ancaman serta permasalahan yang dapat mengganggu ketenangan hidup seseorang.

(2) *Kebutuhan akan Rasa Cinta dan memiliki atau kebutuhan social* "*love and belongingnext needs*". Pemenuhan kebutuhan ini cenderung pada terciptanya hubungan sosial yang harmonis dan kepemilikan.

[20] *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016* (Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016), 13-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) *Kebutuhan Harga diri* "*self esteem needs*". Setiap manusia membutuhkan pengakuan secara layak atas keberadaannya bagi orang lain. Hak dan martabatnya sebagai manusia tidak dilecehkan oleh orang lain, bilamana terjadi pelecehan harga diri maka setiap orang akan marah atau tersinggung.

(4) *Kebutuhan Aktualisasi Diri* "*self actualization needs*". Setiap orang memiliki potensi dan itu perlu pengembangan dan pengaktualisasian. Orang akan menjadi puas dan bahagia bilamana dapat mewujudkan peran dan tanggungjawab dengan baik.

Dari rincian diatas, kebutuhan sosial psikologis dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan sekitar dan transportasi.[21]

c) Kebutuhan pengembangan

Pengembangan sumber daya manusia meliputi : unsur kesehatan dan gizi, kesempatan kerja, lingkungan hidup sehat, pengembangan karir ditempat kerja, kehidupan politik yang bebas, serta pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, pendidikan dan pelatihan merupakan unsur terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, kebutuhan pengembangan juga bisa dilihat dari tingkat

[21] *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016* (Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016), 27-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partisipasi angkatan kerja (TPAK), akses teknologi informasi dan komunikasi, serta menabung dan pemberian sumbangan.[22]

3) Faktor – Faktor Kesejahteraan[23]

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat diantaranya:

a) Faktor intern keluarga

(1) Jumlah anggota keluarga

Pada zaman seperti sekarang ini, tuntutan keluarga semakin meningkat tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, dan pendidikan) tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana transportasi dan lingkungan yang serasi. Kebutuhan diatas akan lebih memungkinkan dapat terpenuhi jika jumlah anggota dalam keluarga berjumlah kecil.

(2) Tempat tinggal

Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan suatu keluarga yang mana keadaan tempat tinggal yang diatur sesuai dengan selera keindahan penghuninya, akan lebih menimbulkan suasana yang tenang dan menggembirakan serta menyejukkan hati. Sebaliknya tempat tinggal yang tidak teratur, tidak jarang menimbulkan

[22] Ibid.., 27-87.

[23] http://gloriabetsy.blogspot.com/2012/2/konsep-keluarga-sejahtera.html (Selasa, 21 Maret 2017, 20.07)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebosanan untuk menempati. Kadang-kadang sering terjadi ketegangan antara anggota keluarga yang disebabkan kekacauan pikiran karena tidak memperoleh rasa nyaman dan tentram akibat tidak teraturnya sarana dan keadaan tempat tinggal.

(3) Keadaan sosial ekonomi keluarga

Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga manifestasi daripada hubungan yang benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang, nampak dengan adanya saling hormat, menghormati, toleransi, bantu-membantu, dan saling mempercayai.

(4) Keadaan ekonomi keluarga

Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga.semakin banyak sumber-sumber keuangan atau pendapatan yang diterima, maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga.

b) Faktor ekstern

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor yang dapat mengakibatkan kegoncangan jiwa dan ketentraman batin anggota keluarga yang datangnya dari luar antara lain:

(1) Faktor manusia: iri hati, fitnah, ancaman fisik, pelanggaran norma.

(2) Faktor alam: bahaya alam, kerusuhan, dan berbagai macam virus penyakit.

(3) Faktor ekonomi negara: pendapatan tiap penduduk atau income perkapita rendah, inflasi, dan lain-lain.

4) Kriteria Miskin Menurut Standart BPS[24]

a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang

b) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan

c) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbiakayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plester

d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain

e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik

f) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/ sungai air hujan

g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah

[24] http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/ (Senin, 07 Agustus 2017, 22.45)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu

i) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun

j) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari

k) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/ Poliklinik

l) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,-

m) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga; tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD

n) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimum Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin.

b. Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan merupakan paduan dari dua kata masyarakat dan nelayan.

1) Pengertian Masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian masyarakat yang dalam istilah bahasa Inggris disebut Society (berasal dari kata latin, socius yang berarti ”kawan”). Masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang artinya ikut serta atau berperanserta. Jadi masyarakat adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lainnya.[25]

Sedangkan menurut Koentjaraningrat dalam ”Ilmu sosial Dasar” masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterikatan untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat adalah tempat kita bisa melihat dengan jelas proyeksi individu sebagai (input) bagi keluarga, keluarga sebagai tempat prosesnya, dan masyarakat adalah tempat kita melihat hasil (output) dari proyeksi tersebut.[26]

2) Pengertian Nelayan

Nelayan di dalam Ensiklopedia Indonesia digolongkan sebagai pekerja, yaitu orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya. Dalam kamus besar

[25] Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 119-120.

[26] Darmansyah dkk, Ilmu Sosial Dasar (Kumpulan Essei), (Surabaya:Usaha Nasional,1986), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia pengertian nelayan adalah orang yang mata pencaharian utama dan usaha menangkap ikan dilaut.[27]

Dari beberapa definisi masyarakat dan definisi nelayan yang telah disebutkan diatas dapat di tarik suatu pengertian bahwa:

a) Masyarakat nelayan adalah kelompok manusia yang mempunyai mata pencaharian menangkap ikan di laut.
b) Masyarakat nelayan bukan hanya mereka yang mengatur kehidupannya hanya bekerja dan mencari di laut, melainkan mereka yang juga tinggal disekitar pantai walaupun mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam dan berdagang.

Maka pengertian masyarakat nelayan secara luas adalah sekelompok manusia yang mempunyai mata pencaharian pokok mencari ikan dilaut dan hidup di daerah pantai, bukan mereka yang bertempat tinggal di pedalaman, walaupun tidak menutup kemungkinan mereka juga mencari ikan di laut karena mereka bukan termasuk komunitas orang yang memiliki ikatan budaya masyarakat pantai.

Jadi yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat nelayan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan seseorang yaitu baik sosial material maupun spiritual yang disertai dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin sehingga dapat memenuhi kebutuhan

[27] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1989), 612.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasmaniyah, rohaniyah dan sosialnya.[28] Kesejahteraan disini dilihat dari terpenuhinya tiga aspek kesejahteraan (indikator kesejahteraan) yakni terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangan tahun 2017.[29]

Kebutuhan dasar manusia yang dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan yakni diantaranya dari pengeluaran rumah tangga, konsumsi energi dan protein/kecukupan gizi, kualitas rumah tinggal, fasilitas rumah tangga, status kepemilikan rumah tinggal, dan angka kesakitan. Sedangkan kebutuhan sosial psikologis dilihat dari kebutuhan akan pendidikan (angka buta huruf, lama sekolah, tingkat pendidikan), interaksi dengan lingkungan, rekreasi dan transportasi. Kebutuhan pengembangan dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), akses teknologi informasi dan komunikasi, serta menabung dan pemberian sumbangan.[30] Semua itu bisa dilihat dari tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat nelayan setelah diterapkannya PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tahun 2017.

---

[28] Sudarman Danim, *Transformasi Sumber Daya Manusia: Analisis Fungsi Pendidikan Dinamika Perilakudan Kesejahteraan Manusia Indonesia Masa Depan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 7.
[29] http://www.bkkbn.go.id/privince/yogya/MENU 04.htm (Rabu, 11 Mei 2016, 08.00)
[30] *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016* (Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016), 13-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tahun 2017 tidak ditemukan. Oleh karena itu, peneliti mengambil penelitian sebelumnya mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets), diantaranya adalah:

1. **Nanik Ermawati dan Zullyati (2015)**

   Penelitian ini berjudul "Dampak Sosial dan Ekonomi atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 (Studi Kasus Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)". Artikel, Penelitian Nanik Ernawati dan Zullyati, Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.[31] Dari penelitian tersebut peneliti menemukan dampak yang ditimbulkan setelah diterapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 diantaranya yaitu dari segi sosial terdapat pengangguran yang meningkat, kesejahteraan masyarakat nelayan menurun dan tingginya kejahatan. Sedangkan dari segi ekonomi terjadi penurunan hasil tangkap ikan yang berakibat pada penurunan pendapatan atau penghasilan dan dengan kondisi ekonomi nelayan mengakibatkan 30% dari para nelayan meliburkan diri, 40% dari nelayan beralih ke usaha lain dan 30% sisanya serabutan.

[31] Nanik Ermawati dan Zullyati "Dampak Sosial dan Ekonomi atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 (Studi Kasus Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)", www.unisbank.ac.id/sendi_u/article/viewfile/3287/894 (Selasa, 19 April 2016, 21.51)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama ingin mengkaji dampak atau pengaruh yang ditimbulkan setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia bagi masyarakat nelayan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan dan fokus kajiannya yang mana peneliti sebelumnya berfokus pada dampak sosial dan ekonomi sedangkan penulis berfokus pada pengaruh adanya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) terhadap kesejahteraan nelayan.

2. **Maya Resty Andryana (2016)**

Penelitian ini berjudul "Dampak Pelarangan Cantrang Bagi Nelayan". Penelitian, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institud Pertanian Bogor.[32] Hasil dari penelitian ini, alat penangkapan ikan sebagai salah satu input usaha perikanan memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan perikanan. Pelarangan cantrang dilakukan karena pengoperasiannya mengancam ekosistem dan sumberdaya ikan. Di sisi lain, cantrang merupakan alat penangkapan ikan tradisional yang sebagian besar digunakan oleh nelayan Pantai Utara Pulau Jawa, sehingga pelarangan cantrang akan menimbulkan dampak bagi

[32] Maya Resty Andryana "Dampak Pelarangan Cantrang Bagi Nelayan", http://www.skpm.ipb.ac.id (Senin, 16 Januari 2017, 22.55)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan nelayan. Dampak ekologis pelarangan cantrang akan menimbulkan dampak positif bagi kondisi lingkungan, namun kenyataan tersebut akan berbanding terbalik dengan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Pada aspek ekonomi, pelarangan cantrang akan memengaruhi tingkat pendapatan, jumlah hasil tangkapan, dan diferensiasi alat tangkap. Dampak sosial yang ditimbulkan pelarangan yaitu berubahnya hubungan sosial dalam kehidupan nelayan, tingkat kesejahteraan yang menurun, dan tingkat kemampuan nelayan untuk mengoperasikan alat tangkap selain cantrang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama ingin mengkaji dampak atau pengaruh yang ditimbulkan setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia bagi masyarakat nelayan karena cantrang merupakan salah satu alat yang di larang dalam PERMEN-KP Nomor 2 tahun 2015. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan dan fokus kajiannya yang mana peneliti sebelumnya berfokus pada dampak salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang yaitu cantrang sedangkan penulis berfokus pada pengaruh adanya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) terhadap kesejahteraan nelayan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kerangka Berpikir

Tabel 2.1
Kerangka Berpikir

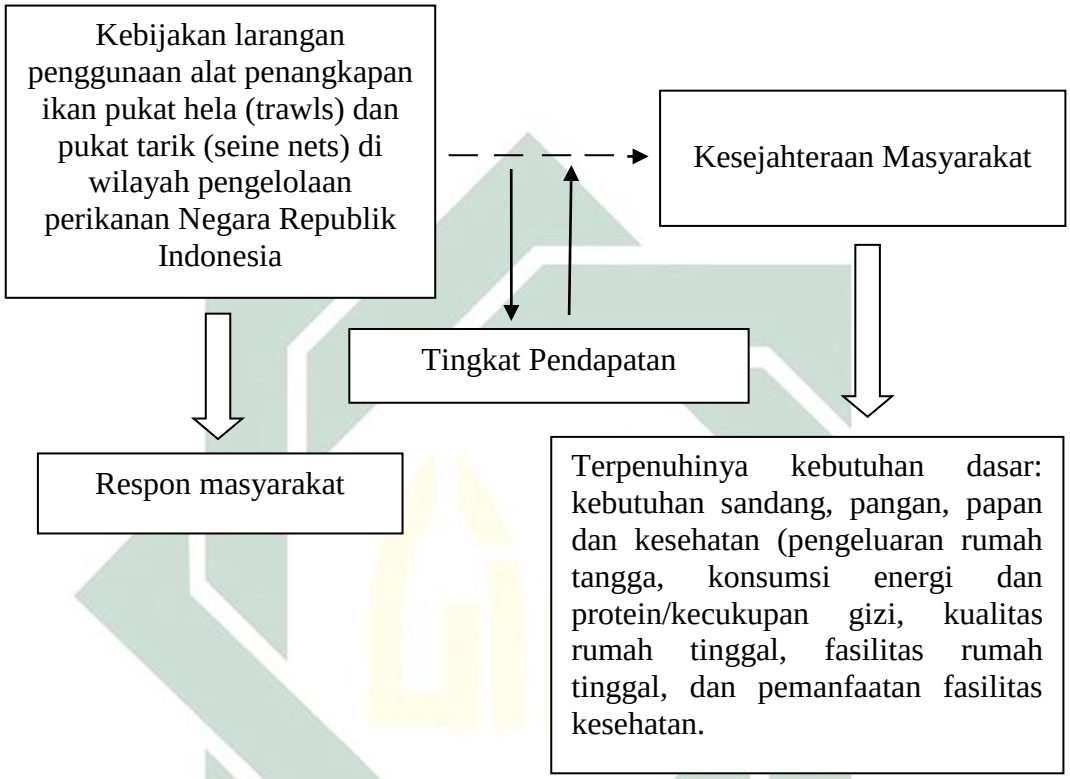

Dari kerangka berpikir di atas dimaksudkan bahwa muncul atau dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, akan mampu memunculkan respon masyarakat terhadap kebijakan baik itu pro maupun kontra. Dan setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban karena hasil tangkapan yang semakin sedikit. Ketika tingkat pendapatan masyarakat nelayan berkurang, hal itu akan mempengaruhi tingkat pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan akan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat nelayan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tahun 2017. Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Eko Wahyudi selaku nelayan Desa Palang bahwa hasil tangkapan ikan sebelum dikeluarkannya kebijakan mengenai larangan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) bisa mencapai 10-15 ton atau juga 5-7 ton untuk sekali penangkapan. Sedangkan setelah diberlakukannya kebijakan tersebut hasil penangkapan yang didapatkan mengalami penurunan hanya sekitar 3-5 ton untuk satu kali penangkapan. Adapun indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yakni dengan terpenuhinya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia yang dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan yakni diantaranya dari pengeluaran rumah tangga, konsumsi energi dan protein/kecukupan gizi, kualitas rumah tinggal, fasilitas rumah tangga, status kepemilikan rumah tinggal, dan angka kesakitan.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara jawaban sementara yang masih lemah kebenarannya, maka diperlukan uji kebenarannya terhadap rumusan masalah penelitian.[33] Adapun jenis hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu:[34]

[33] Syofian siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif,* (Jakarta: kencana, 2014), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. H_0 (H nol), yaitu hipotesa yang menyatakan ketiadaan hubungan antara variabel yang sedang dioperasionalkan.
2. H1 (H satu) atau disebut Hipotesa alternative (Ha), yaitu hipotesa yang menyatakan keberadaan hubungan diantara variabel yang sedang dioperasionalkan.

Berdasarkan Pemaparan diatas, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut :

a. H_0 : Tidak Ada Pengaruh positif yang signifikan antara kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tahun 2017.
b. H1 : Ada Pengaruh positif yang signifikan antara kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tahun 2017.

[34] Ibid, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id